



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Timur**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2020 agar kinerja pencapaian target-target pembangunan dapat dimaksimalkan.

Penyusunan Rencana Kerja RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2021 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja, serta sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 September 2021



**MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199402 1 001



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD .....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD .....	22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat .....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	64
BAB V PENUTUP .....	81
LAMPIRAN.....	82



## [BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai Rancangan RENJA Diskominfo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika, dan Statistik.

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi public sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RenjaSKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 . Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana



pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan oleh SKPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 2 bahwa rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD; Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; maka dalam penyusunan Rancangan RENJA ini Diskominfo berupaya untuk melaksanakan amanat seperti yang tertulis tersebut.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

**“TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS  
DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.”**

Maksud dari visi diatas adalah “Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas” memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam sistem pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

**1.1.1. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.



#### 1.1.2. **Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD**

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun, hingga perencanaan pada tataran SKPD adalah Renja SKPD. Penyusunan RPJMD dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen – dokumen perencanaan lainnya, mulai dari tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

#### 1.1.3. **Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah**

Penetapan program, kegiatan dan operasional pelayanan yang adadirancangsecaraberjenjang, melaluimekanismemusyawarahpembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi public sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

#### 1.1.4. **Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja K/L**

Setiap tahun selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun Dalam kaitan dengan sistem keuangan, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).





#### 1.1.5. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/kota

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja kabupaten dilakukan pada saat Forum Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi yang mencakup :

1. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai :
  - Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
  - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan informasi publik.
  - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, dapat tercapai untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Perangkat Daerah dengan Renja Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kominfo

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RENJA Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).



- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra OPD.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 .
- n. Peraturan Gubernur Nomor: 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah dan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum, dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun kedepan serta rencana kerjanya.

Tujuan penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai pedoman PD dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2021 sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.





#### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rancangan RENJA Diskominfo Prov. Kaltim adalah sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja.

b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan akhir RKPD, penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

c. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rancangan Renja PD, Program dan Kegiatan.

d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Kerja, program dan kegiatan, sasaran, indicator kinerja, dan pendanaan untuk tahun 2021.

e. Bab V Penutup

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja PD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh PD.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki visi: “***Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas***”. Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.

Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program / Kegiatan Perencanaan telah sinkron dengan pelaksanaan Proses pengadaan sesuai dengan tatakala yang telah ditetapkan (tepat waktu), dan Evaluasi pekerjaan yang selalu dilakukan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra - Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut dengan mempercepat pelaksanaan fisik dan memperketat pengawasan di lapangan. Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rencana kerja tahun 2021 terdapat 5 program, 14 kegiatan dan 52 Sub kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



Tabel T-C.29

 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
 Provinsi Kalimantan Timur

2019-2020

Urusan	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%) 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	10			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika									
2	10			Dinas Komunikasi dan Informatika			16.361.737.779	26.349.917.000	23.401.998.017	88,81	20.825.000.000	60.588.735.796	
2	10	07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		4.252.950.000	4.252.950.000	4.159.850.120	97,81	4.217.796.862	12.630.596.982	
2	10	07	01	Pelaksana Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran		4.252.950.000	4.252.950.000	4.159.850.120	97,81	4.217.796.862	12.630.596.982	
2	10	08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur			1.196.720.000	1.120.103.270	93,59	2.303.400.937	3.423.504.207	
2	10	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		336.790.000	336.790.000	320.571.165	95,18	1.573.585.437	2.230.946.602	
2	10	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana		859.930.000	859.930.000	837.174.251	97,35	729.815.500	2.426.919.751	



2	10	09		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			1,773,850,000	1.532.334.005	86,38	861.525.000	2.393.859.005
2	10	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		1.557.500.000	1,557,500,000	1.326.702.890	85,18	555.625.000	3.439.827.890
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah							
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman							
2	10	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek		216.350.000	216,350,000	205.631.115	95,04	305.900.000	727.881.115
					Jumlah Pakaian Dinas							
				<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>			131,000,000	124.233.890	94,83	149.000.000	273.233.890
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran		50.000.000	50,000,000	45.702.634	91,40	10.000.000	105.702.634
				Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan		81.000.000	81,000,000	78.531.256	96,95	139.000.000	298.531.256
				<b>Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Persentase siswa sekolah dan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi bidang TIK</b>			381.200.000	360.756.860	94,64	30.056.660	390.813.520
				Peningkatan Sumber Daya TIK	1. Jumlah pelatihan untuk siswa (SD/SMP/SMA/Sederajat)		381.200.000	381.200.000	360.756.860	94,64	30.056.660	772.013.520
					2. Jumlah bimbingan teknis Pranata							



				Komputer								
2	10	12		<b>Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</b>	<b>Jumlah Lembaga yang mengembangkan media center informasi publik</b>			2.333.625.000	2.008.939.485	86,09	1.155.795.340	3.164.734.825
				Koordinasi bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di daerah, BUMN dan Swasta Lokal Provinsi, Kab/Kota	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Kominfo		235.800.000				104.800.000	340.600.000
				Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah	Workshop, bimtek, sarana dan prasarana kegiatan jurnalistik dll		150.000.000	150.000.000	133.478.200	88,99	67.260.000	350.738.200
2	10	12	03	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial		150.000.000	2.183.625.000	1.875.461.285	88,89	983.735.340	3.009.196.625
				Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam pemeringkatan E-Government		210.100.000	285.100.000	278.524.414	97,69		448.624.414
2	10	13		<b>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik</b>			486.600.000	472.173.696	97,24	1.220.517.600	1.692.691.296
				Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho		175.000.000	175.000.000	173.109.500	98,92	345.760.000	693.869.500
				Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interaktif di radio dan televisi		30.000.000	30.000.000	29.834.000	99,45	42.750.000	102.584.000
				Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi	jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM						628.517.600	628.517.600



				kebijakan pemerintah daerah							
				Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	127.000.000	127.000.000	116.162.196	91,47	191.690.000	434.852.196
2	10	13	05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah dan diluar daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran / expo/ pekan kebudayaan daerah	130.000.000	153.600.00	15.068.000	99,65	11.800.000	156.868.000
2	10	14		<b>Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi</b>		481.862.500	471.129.577	97,77	236.975.000	708.104.577
2	10	14	06	Pengembangan Sumber Informasi Publik	Jumlah PPID Pembantu di Badan Pemerintah Pemprov. Kaltim dan PPID Kab/kota yang dikoordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	353.800.000	481.862.500	471.129.577	97,77	236.975.000	1.061.904.577
2	10	15		<b>Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa</b>	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>		2.545.942.500	2.269.823.341	89,15	2.267.565.452	4.537.388.793
2	10	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	Kapasitas Bandwidth internet	884.450.000	996.700.00	777.682.772	78,03	810.350.000	2.472.482.772
2	10	15	03	interkoneksi jaringan intra pemerintah	Jumlah OPD Terhubung dalam jaringan	707.180.000	847.205.000	812.240.100	95,87	809.700.000	2.329.120.100
2	10	15	04	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi di Pemprov Kaltim& Kab/Kota Kaltim (Interoperabilitas)	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi	175.300.000	250.237500	241.255.635	96,41	134.624.600	551.180.235
				Pembinaan dan Pengembangan Telecenter	Jumlah Jaringan terpasang di Desa Kab/Kota					143.525.000	143.525.000
				Penguatan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang mendapat pembinaan/penguatan SPBE					369.365.852	369.365.852





2	10	16		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem pengamanan data elektronik</b>			1.521.050.000	1.472.457.435	96,81	3.203.742.463	4.676.199.898
2	10	16	04	Pengembangan dan penyelenggaraan DC dan DRC	Jumlah Hosting Aplikasi DC dan DRC		273.450.000	618.050.000	602.080.761	97,42	1.817.725.000	2.693.255.761
				Government cloud computing	Jumlah Penggunaan Cloud Computing		41.900.000	41.900.000	40.096.192	95,69		81.996.192
				Pelaksanaan audit TIK	Terstandarisasinya Audit TIK		75.500.000	75.500.000	73.681.460	97,59	68.490.500	217.671.960
				Penangan Insiden Keamanan Informasi	Jumlah Penggunaan Secure Socket Layer Pada Website dan Aplikasi Resmi OPD		91.100.000	91.100.000	83.853.600	96,44	1.057.010.500	1.231.964.100
				Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Tersedianya sarana pendukung layanan		325.000.000					325.000.000
2	10	16	10	Peningkatan penyediaan informasi dan data KPU/USO di kaltim	Terlayannya informasi dan data KPU/USO		150.000.000	219.500.000	211.610.900	96,41		361.610.900
				Penyediaan dan pengumpulan data informasi mitra telekomunikasi dan penyiaran (radio & televisi)	Tersedianya data dan informasi telekomunikasi dan penyiaran							
				Pengawasan dan pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi	Tersedianya data dan informasi yang terenkripsi		150.000.000	150.000.000	147.703.042	98,47	216.371.188	514.074.230
				Pengelolaan Aplikasi (Sistem Informasi Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang dikelola		166.700.000	166.700.000	160.120.420	96,05	44.145.275	370.965.695
				<b>Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan</b>			212.000.000	208.114.416	98,17		208.114.416
				Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK)		212.000.000	212.000.000	208.114.416	98,17		420.114.416



				yang dihasilkan								
				<b>Program penguatan dan evaluasi data dan statistik</b>	<b>jumlah Kajian yang diselesaikan</b>						330.678.967	330.678.967
				Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel						330.678.967	330.678.967

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
	Usuran	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%) 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Desiminasi Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik									
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi	Jumlah Perubahan Pertama Kebijakan	80 Peserta								



					dan Komunikasi Publik	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik							
2	16	2	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	275 Peserta						
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	8 Media Center						
2	16	2	1.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan						
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Persentase Isu Strategis terkait Kebijakan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan						
2	16	2	1.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan						
2	16	2	1.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	50 Perangkat Daerah						



2	16	2	1.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	3 Laporan										
2	16	2	1.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan										
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Informasi Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Media Komunikasi Publik	2 Laporan										
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Komunikasi Publik	40 Orang										
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang tertangani	80 Sengketa										
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi												
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi												
2	16	03	1.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi												



2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah yang di kelola	34 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah provinsi	26 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah								
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kematangan penerapan SPBE	15 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah penerapan spbe perangkat daerah	15 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data daerah	20 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam sistem komunikasi	20 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	1 Laporan							
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	22 Perangkat Daerah							
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah	1 Dokumen							



					Elektronik										
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi	22 Perangkat Daerah								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur									
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim									
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral yang terpublikasikan	3 Buku								
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas SDM nya dalam rangka peningkatan mutu statistik sektoral yang terintegrasi	6 Orang								
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Kelengkapan Metadata Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	2 Laporan								
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kebijakan tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2 Laporan								





2	20	02	1.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral yang terintegrasi	1 Sistem Informasi									
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Otorisasi Statistik Sektoral di Perangkat Daerah	5 Laporan									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)										
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Dokumen									
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	30 Orang									
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	1 Laporan									
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani	22 Perangkat Daerah									



				Pemerintah Daerah Provinsi	keamanan informasi								
2	21	02	1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan								
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	1 Laporan						
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI									
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	5 Dokumen						
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	1 Dokumen						
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen						
2	16	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Daftar Gaji dan Tunjangan	14 Laporan						
2	16	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	1 Laporan						
2	16	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	124 Stel						
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan	30 Orang						



				Perundang-Undangan	teknis								
2	16	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daaerah									
2	16	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2 Laporan							
2	16	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	1 Laporan							
2	16	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah laporan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Laporan							
2	16	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan							
2	16	01	1.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit							
2	16	01	1.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	5 Unit							
2	16	01	1.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	20 Unit							
2	16	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen jasa Surat menyurat dan benda pos	12 Bulan							
2	16	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan							
2	16	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan							
2	16	01	1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan							
2	16	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji dan pengelola keuangan	13 Laporan							
2	16	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									



2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Laporan							
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan							
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan Jasa Kebersihan Kantor	12 Laporan							



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :



**Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**, memiliki fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Bidang Statistik sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
- Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan.
- Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian.
- Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Aplikasi Informatika.
- Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Statistik.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.



- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

**Sekretaris Dinas** mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

**Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;
2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;
3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

**Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian,** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian., dengan dibantu:





1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

**Kepala Bidang Aplikasi Informatika**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika., dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.
2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

**Kepala Bidang Statistik**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.



Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 113 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 62 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2021**

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1	
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	
		Pembina/ IV-a	S2		2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	
		Penata / III-c	S2		
		Penata / III-c	S1		1
5	Kepala Seksi	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Pembina/ IV-a	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S2	4	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2	1	1
		Penata / III-c	S1		
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I / IV-a	S2		
		Penata Tk. I / III-d	S1	1	
		Penata /III-c	S2	1	
		Penata /III-c	S1	2	



	Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1	
	Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	1
	Penata Muda Tk.I/ III-b	D3		2
	Penata Muda Tk.I/ III-b	SMA	3	1
	Penata Muda/ III-a	S1		1
	Penata Muda/ III-a	D3	1	
	Penata Muda/ III-a	SLTA	2	1
	Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
	Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	3	
	Pengatur/ II-c	D3	1	1
	Pengatur/ II-c	SLTA	1	2
	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	2	
	Pengatur Muda/ II-a	SMA		
	Pengatur Muda/ II-a	SLTP		
	Pengatur Muda/ II-a	SD		
	<b>Total</b>	51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur :



## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Tabel T-C.30

- Tahun 2019

No	Indikator	SPM/Stan dar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	
1	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta terselenggaranya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6 (Indeks)				3,04 / 116,92%				
				Rp26.349.917.000				Rp23.401.998.017 / 88,81%				
2	Meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran		- Persentase Aset Kantor yang layak fungsi	100%								
			- Presentase Penyusunan dokumen perencanaan dan hasil evaluasi program dan kegiatan tahunan tepat waktu	100%								
			- Presentase penyempurnaan data base administrasi kepegawaian	100%								
3	Terwujudnya penyusunan laporan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan pedoman		Presentase dokuemn evaluasi laporan sesuai dengan pedoman	100%								
4	Terwujudnya tertib administrasi keuangan		- Jumlah laporan SPJ GU tepat waktu	12 Bulan								
			- Jumlah SPP dan SPM GU yang tepat waktu	12 Bulan								
			- Jumlah SPP dan SPM LS yang tepat waktu	12 Bulan								
5	Meningkatnya pemanfaatan website Perangkat Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki wesite	100%				97,69				
				Rp285.100.000				Rp278.524.414				
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK bagi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan TIK dalam pelayanan publik	100%				96,05				
				Rp166.700.000				Rp160.120.240				
7	Meningkatnya SDM yang mempunyai keterampilan dan kemampuan TIK		Persentase SDM yang memahami dan menguasai TIK	100%				94,64				
				Rp381.200.000				Rp360.756.862				



8	Meningkatnya layanan system pemerintah berbasis elektronik		- Jumlah laporan standarisasi keamanan system informasi	Rp91.100.000 1 Laporan				92.05 Rp83.853.600				
			- Jumlah Laporan Aplikasi Sekuriti Appliance	1 Laporan								
9	Mengintegrasikan system Informasi terpadu untuk pelayanan publik		Jumlah Aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi	1 Sistem Informasi Rp847.205.000				95.87 Rp812.240.100				
10	Terhubungnya Perangkat Daerah dalam simpul Jaringan TIK		- Jumlah perangkat daerah terhubung dalam jaringan WAN Prov. Kaltim	Rp250.237.500 3 OPD				96.41 Rp241.255.635				
			- Jumlah OPD yang terlayani akses internet Pemerintah	7 OPD								
11	Terlayannya Hosting / Co Location Server OPD pada Data Center		Jumlah OPD / User yang terlayani pada data center	20 OPD Rp618.050.000				97.42 Rp602.080.761				
12	Terlayannya Cloud Computing OPD		Jumlah OPD yang terlayani dengan Cloud Computing	1 OPD Rp41.900.000				95.69 Rp40.096.192				
13	Meningkatnya Pengembangan Sumber Informasi Publik		Jumlah OPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kaltim	25 OPD Rp481.862.500				97.77 Rp471.129.577				
14	Meningkatnya Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek atau Workshop	2 Kegiatan Rp150.000.000				88.99 Rp133.478.200				
15	Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah		Jumlah kerjasama yang diselenggarakan dengan media public	1 Laporan Rp2.183.625.000				88.99 Rp1.875.461.285				
16	Meningkatnya Komunikasi Publik melalui dialog interaktif radio dan televise		Jumlah dialog interaktif radio dan televisi yang terlaksana	1 Laporan Rp30.000.000				99.45 Rp29.834.000				
17	Meningkatnya pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll		Jumlah poster, leaflet, spanduk, baliho, dan videotron	1 Laporan Rp175.000.000				98.92 Rp173.109.500				
18	Meningkatnya Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah		Jumlah laporan dokumentasi publikasi	1 Laporan Rp127.000.000				91.47 Rp116.162.196				
19	Meningkatnya Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah di dalam dan di luar daerah		Jumlah pameran yang dilaksanakan	2 Laporan Rp153.600.000				99.65 Rp153.068.000				
20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Pemerintah		- Jumlah layanan data informasi penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah	Rp325.000.000 1 Laporan				96.44 Rp313.431.480				
			- Jumlah data nebara telekomunikasi di Kaltim	1 Laporan								
21	Peningkatan Penyediaan Informasi dan Data KPU/USO di Kaltim		Jumlah layanan data informasu KPU/USO di Kaltim	10 Laporan Rp219.500.000				96.41 Rp211.610.900				



22	Pengawasan dan Pengendalian pengamanan informasi, persandian, pos dan telekomunikasi		Jumlah layanan system pemerintahan berbasis elektronik serta tersedianya data informasi persandian	10 Laporan Rp150.000.000				98,47 Rp147.703.042				
23	Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan TV siaran dan TV berlangganan serta radio yang berlisensi		Jumlah Penyelenggaraan TV Siaran dan TV berlangganan serta radio yang berlisensi	1 Laporan								

- 2020

No	Indikator	SPM/Sta ndar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2.8 Indeks				Rp. 334.990.852 / 90.69%			
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK bagi tata kelola E-Government (SPBE)		Presentase Perangkat Daerah yang Terhubung dalam simpul TIK		43 Persen				Rp. 1.431.921.500 / 78.78%			
			Persentase Sinkronisasi data didalam pusat Data API		100 Persen							
			Presentase Jaringan Komunikasi Informasi Teknologi di Desa Kab/Kota		30 Persen							
5	Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki system pengamanan data		Presentase Hosting/Co Location Server Perangkat Daerah pada Data Center		100 75				Rp. 195.223.609 / 90.23%			
			Presentase keamanan system informasi Perangkat Daerah									
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki Sistem Pengamanan		Persentase Data dan Informasi yang ter-enskripsi		82 Persen				Rp. 500.388.500/ 47.34%			





	Data Elektronik											
9	Presentase Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang akurat dan kredibel		Presentase Data Pembangunan Daerah dan Data Pertumbuhan Ekonomi yang akurat dan kredibel		80 Persen					Rp. 857.630.140 / 87.18%		
10	Meningkatnya pemanfaatan TIK bagi tata kelola E-Government / Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE		35 Persen					Rp. 123.331.600 / 91.61%		
11	Tersedianya aplikasi dan terlayannya penamaan SubDomain "Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim		Presentase subdomain resmi "Kaltimprov.go.id" untuk aplikasi Perangkat Daerah Provinsi Kaltim		60 Persen					Rp. 41.776.675 / 94.63%		
12	Meningkatnya SDM yang mempunyai keterampilan dan kemampuan TIK		Presentase SDM yang memahami dan menguasai TIK		30 Persen					Rp. 29.857.660 / 99.34%		
13	Meningkatkan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi Daerah sesuai standarisasi		Presentase Lembaga yang mengembangkan Media Center Informasi Publik		45 Persen					Rp. 6.278.000 /		
14	Meningkatnya Tata Laksana Komunikasi dan Informatika yang baik		Presentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik		84 Persen					Rp. 585.519.150 / 93.16%		
15	Meningkatnya akses layanan informasi		Presentase Cakupan Masyarakat yang memiliki akses terhadap pelayanan informasi		84 Persen					Rp. 236.581.550 / 99.83 %		

- 2021 & 2022

No	Indikator	SPM/Standar nasional	ikk	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	Tahun 2021 (thn n-2) 2019	Tahun 2021 (thn n-1) 2020	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1) 2022	
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3.2 Indeks	3.2 Indeks			Rp. 95.361.726 / 42.18%	Rp. 103.501.500	



2	Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat Kematangan Penerapan SPBE berdasarkan 35 Indikator SPBE			3.03 Indeks SPBE	3.03 Indeks SPBE			Rp. 27.390.000/ 12.11%	Rp. 288.008.000	
5	Melaksanakan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tingkat Penerapan SPBE berdasarkan Rencana Induk			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 95.361.726/ 42.18	Rp. 126.537.500	
	Melaksanakan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Dokumen Arsitektur SPBE			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 46.233.000 / 20.45%	Rp. 329.056.000	
9	Terselenggaranya Seminar, Kegiatan, Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Jumlah Seminar			2 Kegiatan	2 Kegiatan			Rp. 30.847.400 / 52.14%	Rp. 346.034.000	
10	Terselenggaranya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Laporan Aspirasi Etam			10 Laporan	10 Laporan			Rp. 174.025.000 / 10.24%	Rp. 171.900.000	
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi									
11	Terselenggaranya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Jumlah Seminar			1 Kegiatan	1 Kegiatan			Rp. 61.134.492 / 60.06%	Rp. 146.970.000	
12	Terkelolanya Media Komunikasi Publik		Jumlah Berita Jumlah Kegiatan Kreatif Media Jumlah Isu Publik			1000 Berita 1 Kegiatan 10 Laporan	1000 Berita 1 Kegiatan 10 Laporan			Rp. 102.136.000 / 96.07%	Rp. 241.972.000	
13	Meningkatkan Layanan Hubungan Media		Jumlah Kegiatan Pemantauan Isu Publik dan Seminar Anti Hoax			2 Kegiatan	2 Kegiatan			Rp. 193.432.800 / 69.46%	Rp. 146.640.000	
14	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistic sosial		Data Statistik Sosial			1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 292.483.447 / 76.53%	Rp. 115.200.000	
15	Tersedianya jumlah data		Data Statistik Ekonomi			1 Dokumen	1			Rp. 90.186.042	Rp.	



	pembangunan daerah statistic ekonomi					Dokumen			/ 64.19%	244.727.00	
16	Tersedianya jumlah data pembangunan daerah yang akurat dan kredibel berdasarkan data statistik SDA dan infrastruktur		Data Statistik SDA dan infrastruktur		1 Dokumen	1 Dokumen			Rp. 45.085.760 / 90.17%	Rp. 222.293.000	
17	Meningkatkan Jumlah hosting, co. location, cloud computing pada data center		Jumlah hosting aplikasi/website yang ditempatkan di data center		5 Aplikasi	5 Aplikasi			Rp.529.031.964 / 57.43%	Rp. 2.502.904.000	
18	Terhubungnya perangkat daerah dan distribusi Bandwidth dalam simpul jaringan TIK		Jumlah OPD yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah		18 PD	18 PD			Rp. 18.059.286 / 25.80%	Rp. 84.743.000	
19	Pengelolaan data dan informasi elektronik yang terkoordinir dan tersinkronisasi		Presentase perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data		30% PD	30% PD			Rp. 12.143.670 / 60.72%	Rp. 55.892.500	
20	Sistem penghubung layanan yang terselenggara dengan baik		Presentase layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan Pemerintah		30% Layanan	30% Layanan			Rp. 86.364.200 / 67.87%	Rp. 167.620.000	
21	Meningkatkan layanan monitoring trafik data keamanan informasi		Jumlah OPD yang di monitor keamanan dan aktivitasnya pada NOC Diskominfo Prov. Kaltim		5 OPD	5 OPD			Rp. 13.972.800 / 47.21%	Rp. 2.655.305.900	
22	Meningkatkan keamanan informasi pada data center kominfo Prov. Kaltim		Jumlah laporan keamanan informasi pada data center kominfo		2 Laporan	2 Laporan			Rp. 27.013500 / 38.59%	Rp. 373.086.000	
23	Meningkatkan Pelayanan komunikasi intra pemerintah yang secure		Jumlah laporan terkait pelaksanaan kegiatan Data Center		1 Laporan	1 Laporan			Rp. 157.287.496 / 51.49%	Rp. 346.034.000	
24	Meningkatkan Penanganan insiden keamanan informasi		Jumlah laporan kab/kota yang di audit terkait keamanan informasinya		1 Laporan	1 Laporan			Rp. 13.972.800 / 47.21%	Rp. 171.900.000	



Adapun pencapaian urusan bidang Kominfo tahun 2021 dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi secara cepat, tepat, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan masyarakat, maka dalam Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan:

1. Penyediaan jaringan layanan informasi yaitu
  - Sewa bandwidth teresterial
  - Sewa Link Fiber Optic
2. Media Center merupakan tempat untuk mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial;
3. Pada tahun 2021 untuk publikasi dilaksanakan pembuatan leaflet, baliho, dan spanduk.
4. Dalam rangka mempublikasikan informasi tentang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021 Diskominfo Provinsi Kaltim secara berkesinambungan melakukan kerjasama dengan TVRI Kalimantan Timur dan RRI Samarinda. Acara dialog interaktif di TVRI dilakukan setiap hari Rabu sedangkan untuk RRI setiap hari Selasa dengan nara sumber dari OPD dilingkungan Pemprov. Kaltim, Akademisi, LSM, DPRD dan Tokoh Masyarakat.
5. Pada tahun 2021 setiap Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara rutin dilakukan pendokumentasian.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim direncanakan berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pameran yang digunakan sebagai sarana publikasi baik kegiatan Dinas Kominfo Prov. Kaltim sendiri maupun capaian pembangunan secara keseluruhan. Di tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim yaitu 2 kegiatan pameran di dalam daerah).

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Adapun isu strategis pada Dinas Kominfo Prov. Kaltim sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Government) dalam urusan Pemerintahan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Kalimantan Timur akan informasi pembangunan daerah
- c. Blankspot yang masih terjadi di beberapa daerah pada provinsi Kalimantan Timur dikarenakan minimnya infrastruktur telekomunikasi

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar. Tugas Pokok yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023 yang akan ditetapkan.

Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan



baik dan layak. Melihat pentingnya infrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, dengan meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah interoperabilitas sistem informasi.

Program-program pembangunan ini harus dilaksanakan secara konsisten agar mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan program-program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur membuat skala prioritas atau bertahap dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan serta mempertimbangkan kondisi faktual isu-isu strategis di daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar dapat memberikan akses layanan informasi dan komunikasi untuk kebutuhan publik secara tepat, cepat, efisien dan efektif serta sinergis dengan perkembangan teknologi yang tersedia.

Di tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sasaran dalam mempercepat dan meningkatkan pelayanan publik, hal utama yang akan dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur diantaranya pengembangan infrastruktur TIK dan interoperabilitas aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi dalam hal pelayanan publik. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah pengembangan akses telekomunikasi di daerah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini



**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur**  
Tabel T-C.31

No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				29.770.575.464	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				21.191.011.120	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	6.945.822.400	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	5.358.525.861	
2	16	02	1.01		<b>Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	6.945.822.400	<b>Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	5.358.525.861	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	75 Peserta	59.165.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	75 Peserta	30.847.400	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta	250 Peserta	174.025.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta	250 Peserta	17.820.953	





2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04 indeks	5.035.579.830	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04 indeks	3.150.893.148	
2	16	03	1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah persentase layanan domain	25 Persen	2.065.535.550	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah persentase layanan domain	25 Persen	1.716.787.750	
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	34 Perangkat Daerah	275.973.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	34 Perangkat Daerah	138.928.000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	30 PD	1.789.562.550	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	30 PD	1.577.859.750
2	16	03	1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	50 Persen	2.970.044.280	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan	50 Persen	1.434.105.398	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80 Persentase	226.100.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	kosong	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80 Persentase	27.390.000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	1 Dokumen	226.100.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	1 Dokumen	95.361.726
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	10 Perangkat Daerah	921.250.280	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	10 Perangkat Daerah	529.031.964
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	20 PD	325.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	20 PD	188.439.795





2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	1 Dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	1 Dokumen	52.419.660
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	10 Perangkat Daerah	180.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	10 Perangkat Daerah	113.275.654
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	1 Dokumen	226.100.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	1 Dokumen	46.233.000
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	10 Perangkat Daerah	310.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	10 Perangkat Daerah	224.666.103
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	305.494.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	157.287.496
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50 %	953.673.080	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50 %	613.541.149
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50 Persen	953.673.080	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50 Persen	613.541.149
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral	3 Buku	382.199.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral	3 Buku	292.483.447



										Sektoral						
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Kota	/	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten Kota	/	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	45.085.760
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan Hasil Survei dan Metadata Statistik Sektoral	1 Laporan	115.300.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan Hasil Survei dan Metadata Statistik Sektoral	1 Laporan	39.986.800
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan FGD Statistik Sektoral	1 Laporan	118.673.950	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan FGD Statistik Sektoral	1 Laporan	60.064.450
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Kota	/	umlah Sistem Informasi Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi	140.499.630	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten Kota	/	umlah Sistem Informasi Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi	90.186.042
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	1 Laporan	147.000.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	1 Laporan	85.734.650
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Indeks keamanan informasi	10 Indeks		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Indeks keamanan informasi	10 Indeks	
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	2 Indeks	316.849.592	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	2 Indeks	157.553.456
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Dokumen	70.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Dokumen	18.059.286



2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah peserta peningkatan kegiatan kompetensi keamanan informasi	100 Orang	70.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah peserta peningkatan kegiatan kompetensi keamanan informasi	100 Orang	27.013.500
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kota	/	Jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Dokumen	29.600.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Kota	/	Jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Dokumen	13.972.800
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	10 Perangkat Daerah	127.249.592	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kota	/	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	10 Perangkat Daerah	86.364.200
2	21	02	1.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>			<b>Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan</b>	<b>1Kegiatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>			<b>Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan</b>	<b>1Kegiatan</b>	<b>12.143.670</b>
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong		Jumlah perangkat jaringan komunikasi sandi	1 perangkat	20.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong		Jumlah perangkat jaringan komunikasi sandi	1 perangkat	12.143.670
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100%	16.518.650.562	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100%	11.910.497.506
2	16	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			umlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	11 Dokumen	186.915.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			umlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	11 Dokumen	94.555.700
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	102.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	67.518.700
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kota	/	umlah Dokumen LAJKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.290.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kota	/	umlah Dokumen LAJKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	360.000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	35.375.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kota	/	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	26.677.000
2	16	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Terwujudnya tertib administrasi keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>10.675.536.354</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Terwujudnya tertib administrasi keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>7.206.258.527</b>



2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen pengelola keuangan	12 Bulan	10.675.536.354	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen pengelola keuangan	12 Bulan	7.206.258.527
							Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	12 Bulan				Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	12 Bulan	
2	16	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota			0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota			
2	16	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur</b>	<b>124 Orang</b>	<b>110.135.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur</b>	<b>124 Orang</b>	<b>109.325.000</b>
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas	124 Orang	110.135.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas	124 Orang	109.325.000
2	16	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor</b>	<b>120</b>	<b>1.303.436.346</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor</b>	<b>120</b>	<b>1.173.493.800</b>
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	17.738.346	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	17.735.000
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	1.098.305.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	1.034.368.700
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30.468.000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21.512.400
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kota	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	156.925.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kota	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	99.877.700
							Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan				Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	
2	16	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor</b>	<b>1 Unit</b>	<b>27.200.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor</b>	<b>1 Unit</b>	<b>27.200.000</b>
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah penyediaan mebel	1 Unit	27.200.000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah penyediaan mebel	1 Unit	27.200.000
2	16	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Samarinda	<b>Mengukur efektivitas administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>3.512.621.562</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Mengukur efektivitas administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2.777.668.746</b>



2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang di administrasikan	12 Bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang di administrasikan	12 Bulan	4.039.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	422.751.113	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	273.032.003
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	59.875.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	36.737.000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	3.023.995.449	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	2.463.860.743
2	16	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana Prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>702.806.300</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana Prasarana</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>521.995.733</b>
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	332.045.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	220.099.833
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Bangunan	119.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Bangunan	117.980.000
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	251.100.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	183.915.900



## 2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Untuk melaksanakan misi *Good Governance*, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat perlu diakomodir dengan mempermudah akses terhadap informasi publik dengan membuat dan mengembangkan akses sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudahan dan wajar. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa setiap Badan Publik wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Selain itu terdapat beberapa masalah yang terjadi di masyarakat yaitu:

- a. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil umumnya berlatar belakang pendidikan kurang memadai;
- b. Pola pikir sederhana, umumnya sibuk bertani;
- c. Kurang kesempatan memperoleh pendidikan karena tidak tersedianya lembaga pendidikan yang memadai di desanya;
- d. Kurangnya Informasi sebagai akibat terjangkaunya desa mereka oleh jaringan layanan informasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat wilayah Kalimantan Timur adalah kurangnya informasi akibat kurang terjangkaunya daerah-daerah tersebut dengan fasilitas informasi yang ada. Wilayah Kalimantan Timur yang sebagian besar merupakan pengunungan yang tertutup oleh hutan lebat. Kondisi ini tentunya menimbulkan masalah dalam penyelenggara telekomunikasi dan telematika bila sarana yang digunakan menggunakan frekuensi radio. Sinyal frekuensi radio tidak bisa menembus bukit atau hutan yang lebat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang tidak bisa menerima sinyal (*blank spot*).

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi “corong” terdepan dalam memberikan kualitas informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengharuskan bekerja sama dengan instansi terkait seperti TVRI, RRI, dan lembaga penyiaran lainnya. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas diharapkan bukan lagi dalam artian terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi akan tetapi menjangkau seluruh elemen pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan informasi mengenai stabilitas sosial, politik, dan kemanan; peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah; serta kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dapat disebarkan kepada masyarakat secara luas sehingga kebutuhan dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2021. Adapun rencana program yang dimaksud sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2021 diantaranya adalah sebagai berikut:



**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(12)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	
2	16	02	1.01		<b>Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>		Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	<b>75 Persen</b>	
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	75 Peserta	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta Sosialisasi Layanan Informasi	250 Peserta	
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah media center yang terevitasilasi	7 Media Center	
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Kabupaten/Kota	Jumlah informasi kebijakan pemerintah daerah	48 PD	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah dialog interaktif radio dan televisi serta media online	96 Dialog	



2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten/Kota	Jumlah PPID pembantu dibadan Pemerintah Pemvprov Kaltim dan PPID Kab/Kota yang dikordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	44 PD	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang diselenggarakan dengan media publik	2 Kerjasama	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang menginformasikan kebijakan kebudayaan pemerintah daerah melalui pameran	2 Kegiatan	
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kabupaten/Kota	- Jumlah Press releasi, Konfrensi Press	12 Konferensi	
							- Jumlah Liputan dan Kunjungan Jurnalistik	1500 Liputan	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Kabupaten/Kota	Terbentuknya Jejaring Kehumasan dan Pengelolaan SP4N LAPOR	46 PD	
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa informasi yang selesai ditangani	78 register sengketa	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah dan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Pranata Humas	100 Orang	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,04 indeks	
2	16	03	1.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah persentase layanan domain</b>	<b>25 Persen</b>	
2	16	03	1.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi				
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	34 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	30 PD	
2	16	03	1.02		<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan</b>	<b>50 Persen</b>	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	80 Persentase	
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	1 Dokumen	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	10 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	20 PD	





2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kabupaten/Kota	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	1 Dokumen	
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	10 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	1 Dokumen	
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	10 Perangkat Daerah	
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas				
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	200 Orang	
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50 %	
2	20	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>		<b>Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>50 Persen</b>	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral	3 Buku	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaten / Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Survei dan Metadata Statistik Sektoral	1 Laporan	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan FGD Statistik Sektoral	1 Laporan	
2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Kabupaten / Kota	jumlah Sistem Informasi Statistik Sektoral	1 Sistem Informasi	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	1 Laporan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				



2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks keamanan informasi	10 Indeks	
2	21	02	1.01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>		<b>Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)</b>	<b>2 Indeks</b>	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 Dokumen	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah peserta peningkatan kegiatan kompetensi keamanan informasi	100 Orang	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	1 Dokumen	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	10 Perangkat Daerah	
2	21	02	1.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>		<b>Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kosong	Jumlah perangkat jaringan komunikasi sandi	1 perangkat	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo	100%	
2	16	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		umlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman	11 Dokumen	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten / Kota	umlah Dokumen LAJKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	
2	16	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terwujudnya tertib administrasi keuangan</b>	<b>12 Bulan</b>	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen pengelola keuangan	12 Bulan	
							Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	12 Bulan	
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda			
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda			
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten/Kota			
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Samarinda			



2	16	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten/Kota			
2	16	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur</b>	<b>124 Orang</b>	
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan pakaian dinas	124 Orang	
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten/Kota			
2	16	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor</b>	<b>120</b>	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 Unit	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Samarinda	Jumlah barang cetak dan pengadaan	12 Bulan	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten / Kota	- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	
							- Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	
2	16	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor</b>	<b>1 Unit</b>	
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda			
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah penyediaan mebel	1 Unit	
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda			
2	16	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Mengukur efektivitas administrasi Perkantoran</b>	<b>12 bulan</b>	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang di administrasikan	12 Bulan	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	



2	16	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Samarinda	<b>Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana Prasarana</b>	12 Bulan	
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 Bulan	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 Bangunan	
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipandang sebagai suatu sistem yang tugas dan fungsinya dilakukan oleh beberapa subsistem yang masing-masing dilaksanakan oleh satu PD. Seluruh PD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saling berinteraksi dan saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali informasi keluaran dari suatu PD akan diolah lebih lanjut oleh PD lainnya untuk menghasilkan informasi yang strategis, sehingga dengan demikian, aliran informasi dari satu PD ke PD lainnya harus dapat dijamin terlaksananya serta kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan perangkat Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung tugas keseharian pemerintahan sudah menjadi suatu kebutuhan. Dalam mewujudkan pembangunan/ pengembangan TIK yang terintegrasi maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bermaksud untuk melakukan sinergi implementasi TIK dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung didalamnya dengan tujuan agar:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.
- b. Menciptakan transparansi terhadap sistem pemerintahan kepada masyarakat serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kaltim.
- c. Mengurangi kesenjangan informasi di segenap lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selain aspek-aspek di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1. Kebijakan dan perundang-undangan.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.



## 2. Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

## 3. Teknologi.

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, karena di masa depan. informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

## 4. Informasi dan edukasi/*e-literacy*.

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan



- oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.
5. Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah *Software* Ilegal/Bajakan. Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memposisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (software) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan software yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja PD

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukannya kebijakan yang berorientasi pada objek sasaran yang akan di capai. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah.
- b. Terwujudnya keterbukaan informasi dengan meningkatkan sistem, metode, dan mutu penyebaran serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
- c. Tersedianya infrastruktur bidang Komunikasi dan Informasi dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diperlukan adanya tindakan nyata berupa program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2021 kegiatan yang diusulkan meliputi 5 program, 14 kegiatan dan 52 sub kegiatan yaitu:

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
  - 1.1. Pengelolaan Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
    - 1.1.1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
    - 1.1.2. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik
    - 1.1.3. Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah
    - 1.1.4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media
    - 1.1.5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - 1.1.6. Pelayanan Informasi Publik
    - 1.1.7. Layanan Hubungan Media
    - 1.1.8. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
    - 1.1.9. Manajemen Komunikasi Krisis
    - 1.1.10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik



- 1.1.11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah
- 1.1.12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - 2.1. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
    - 2.1.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
    - 2.1.2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - 2.2. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah
    - 2.2.1. Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
    - 2.2.2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - 2.2.3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
    - 2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
    - 2.2.5. Koordinasi Dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
    - 2.2.6. Koordinasi Dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik
    - 2.2.7. Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - 2.2.8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
    - 2.2.9. Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - 3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
    - 3.1.1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
    - 3.1.2. Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi
    - 3.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
    - 3.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
    - 3.1.5. Pengembangan Infrastruktur
    - 3.1.6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - 4.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
    - 4.1.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
    - 4.1.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
    - 4.1.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
    - 4.1.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
  - 4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
    - 4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
  - 5.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 5.1.2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
    - 5.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn
  - 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
    - 5.3.1. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd
  - 5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 5.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya





- 5.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.5.2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - 5.5.3. Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
  - 5.5.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
- 5.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 5.6.1. Pengadaan Mebel
- 5.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 5.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - 5.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - 5.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 5.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
  - 5.8.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
  - 5.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya



**TABEL T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DISKOMINFO**

No					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
(1)					(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				APBD			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			29.770.575.464	APBD			51.407.147.693
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	6.945.822.400	APBD			
2	16	02	1.01		Pengelolaan dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik	75 Persen	6.945.822.400	APBD			
2	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Seminar Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Kabupaten/Kota	75 Peserta	59.165.000	APBD		98.580.000
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Peserta Monitoring Opini dan Jumlah Peserta Sosialisasi	Kabupaten/Kota	250 Peserta	174.025.000	APBD	80 Peserta	10.422.000



						Layanan Informasi							
2	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah media center yang terdivitasiasi	Kabupaten/Kota	7 Media Center	101.790.000	APBD		275 Peserta	113.820.000
2	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah informasi kebijakan pemerintah daerah	Kabupaten/Kota	48 PD	106.310.000	APBD		8 Media Center	250.000.000
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dialog interaktif radio dan televisi serta media online	Kabupaten/Kota	96 Dialog	125.500.000	APBD		2 Laporan	2.301.220.000
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID pembantu dibadan Pemerintah Pemvprov Kaltim dan PPID Kab/Kota yang dikordinasikan dalam jejaring pengelolaan pelayanan dan informasi	Kabupaten/Kota	44 PD	217.357.000	APBD		50 Perangkat Daerah	4.100.000.000
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama yang diselenggarakan dengan media publik	Kabupaten/Kota	2 Kerjasama	278.500.000	APBD		3 Laporan	469.298.000
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan yang menginformasikan kebijakan kebudayaan pemerintah daerah melalui pameran	Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	152.000.000	APBD		2 Laporan	350.000.000
2	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	- Jumlah Press releasi, Konfrensi Press - Jumlah Liputan dan Kunjungan Jurnalistik	Kabupaten/Kota	12 Konferensi 1500 Liputan	93.750.000	APBD		2 Laporan	6.660.000
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunitas Publik	Terbentuknya Jejaring Kehumasan dan Pengelolaan SP4N LAPOR	Kabupaten/Kota	46 PD	10.000.000	APBD		40 Orang	150.000.000
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah sengketa informasi yang selesai ditangani	Kabupaten/Kota	78 register sengketa	5.617.407.400	APBD		80 Sengketa	1.500.000.000
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Peningkatan Jumlah dan Kapasitas SDM Jabatan Fungsional Pranata Humas	Kabupaten/Kota	100 Orang	10.000.000	APBD		2 Laporan	200.000.000
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					APBD			
2	16	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>		<b>3,04 indeks</b>	<b>5.035.579.830</b>	<b>APBD</b>			



2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah persentase layanan domain		25 Persen	2.065.535.550	APBD			
2	16	03	1.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi					APBD			
2	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dikelola	Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	275.973.000	APBD		34 Perangkat Daerah	425.000.000
2	16	03	1.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota	30 PD	1.789.562.550	APBD		26 Perangkat Daerah	4.080.149.030
2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan		50 Persen	2.970.044.280	APBD			
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government		80 Persentase	226.100.000	APBD		15 Perangkat Daerah	452.790.000
2	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan e-Government di lingkup Pemerintahan	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	226.100.000	APBD		15 Perangkat Daerah	147.210.200
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	921.250.280	APBD		20 Perangkat Daerah	2.277.015.000
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD terhubung dalam sistem komunikasi	Kabupaten/Kota	20 PD	325.000.000	APBD		20 Perangkat Daerah	118.020.157
2	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Laporan standarisasi keamanan sistem informasi yang terpenuhi	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Laporan	60.000.000
2	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data	Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	180.000.000	APBD		22 Perangkat Daerah	323.430.000
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengembangan sistem informasi dan aplikasi e-Government (spesifik dan suplemen)	Kabupaten/Kota	1 Dokumen	226.100.000	APBD		1 Dokumen	199.999.800



2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Sistem Penghubung Layanan API Pemprov	Kabupaten/Kota	10 Perangkat Daerah	310.000.000	APBD		22 Perangkat Daerah	128.753.750
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas					APBD			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan sumber daya TIK	Kabupaten/Kota	200 Orang	305.494.000	APBD			425.000.000
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)					APBD			
2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					APBD			
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					APBD			
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					APBD			
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur		50 %	953.673.080	APBD			
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur di Pemprov. Kaltim		50 Persen	953.673.080	APBD			
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Data Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	3 Buku	382.199.500	APBD		3 Buku	249.261.768
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Kabupaten / Kota	6 Orang	50.000.000	APBD		6 Orang	104.700.000
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Hasil Survei dan Metadata Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	1 Laporan	115.300.000	APBD		2 Laporan	257.825.000
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Laporan FGD Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	1 Laporan	118.673.950	APBD		2 Laporan	259.293.500



2	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	umlah Sistem Informasi Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	1 Sistem Informasi	140.499.630	APBD		1 Sistem Informasi	428.919.732
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral	Kabupaten / Kota	1 Laporan	147.000.000	APBD			0
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>APBD</b>			
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>APBD</b>			
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Indeks keamanan informasi		10 Indeks		<b>APBD</b>			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)		2 Indeks	316.849.592	<b>APBD</b>			
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi	Kabupaten / Kota	1 Dokumen	70.000.000	APBD		1 Dokumen	28.400.000
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah peserta peningkatan kegiatan kompetensi keamanan informasi	Kabupaten / Kota	100 Orang	70.000.000	APBD		30 Orang	114.346.000
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pengamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	Kabupaten / Kota	1 Dokumen	29.600.000	APBD		1 Laporan	411.407.400
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terlayani keamanan informasi	Kabupaten / Kota	10 Perangkat Daerah	127.249.592	APBD		22 Perangkat Daerah	132.992.000
2	21	02	1.02		<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan</b>		<b>1Kegiatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>APBD</b>			
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah laporan operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi antar provinsi dan kab/kota	Kosong	1 Laporan	83.796.199	APBD		1 Laporan	83.796.199
2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo</b>		<b>100%</b>	<b>16.518.650.562</b>	<b>APBD</b>			



2	16	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan sesuai dengan Pedoman</b>		<b>11 Dokumen</b>	<b>186.915.000</b>	<b>APBD</b>			
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten / Kota	5 Dokumen	102.250.000	APBD		5 Dokumen	81.803.361
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen LAJKIP Perangkat Daerah	Kabupaten / Kota	1 Dokumen	49.290.000	APBD		1 Dokumen	209.720.000
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten / Kota	5 Dokumen	35.375.000	APBD		5 Dokumen	224.360.000
2	16	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya tertib administrasi keuangan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>10.675.536.354</b>	<b>APBD</b>			
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah dokumen pengelola keuangan	Samarinda	12 Bulan	10.675.536.354	APBD		14 Laporan	11.466.04.009
						- Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan		12 Bulan					
2	16	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen LS dan GU Yang diverifikasi	Samarinda	200 Dokumen	0	APBD		200 Dokumen	0
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	Samarinda	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	
2	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan hasil pemeriksaan	Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	0
2	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Realisasi keuangan yang dilaksanakan	Samarinda	12 Laporan	0	APBD		12 Laporan	33.600.000
2	16	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>APBD</b>			
2	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan BMD	Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0
2	16	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Sumber Daya Aparatur</b>		<b>124 Orang</b>	<b>110.135.000</b>	<b>APBD</b>			
2	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Samarinda	124 Stel	110.135.000	APBD		124 Stel	378.810.000
2	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten/Kota		0	APBD		30 Orang	63.500.000
2	16	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya fasilitas Penunjang Alat Kegiatan Kantor</b>		<b>120</b>	<b>1.303.436.346</b>	<b>APBD</b>			



2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Samarinda	12 Bulan	17.738.346	APBD		2 Laporan	19.700.544
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	60 Unit	1.098.305.000	APBD		1 Laporan	59.238.050
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	Samarinda	12 Bulan	30.468.000	APBD		1 Laporan	49.969.800
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD - Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten / Kota	12 Bulan 12 Bulan	156.925.000	APBD		12 Bulan	945.511.000
2	16	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>APBD</b>			
2	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional	Samarinda			APBD		2 Unit	1.163.670.000
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel	Samarinda	1 Unit	27.200.000	APBD		5 Unit	17.500.000
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Samarinda			APBD		20 Unit	51.800.000
2	16	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>APBD</b>			
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di administrasikan	Samarinda	12 Bulan	6.000.000	APBD			12.000.000
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 Bulan	422.751.113	APBD		12 Laporan	482.216.768
2	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	12 Bulan	59.875.000	APBD		12 Laporan	47.880.000
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Samarinda	12 Bulan	3.023.995.449	APBD		13 Laporan	3.247.236.832
2	16	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Samarinda</b>			<b>APBD</b>			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	12 Bulan	332.045.900	APBD		12 Laporan	337.304.700
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah pemeliharaan gedung	Samarinda	1 Bangunan	119.660.000	APBD		1 Laporan	20.000.000.000





					Kantor dan Bangunan Lainnya	kantor							
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Samarinda	12 Bulan	251.100.400	APBD		12 Laporan	249.820.400





		2	10	08	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		60	1.051.357.582	12	1,250.00										
		2	10	08	01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	51	424.034.100	50	400.00										
		2	10	08	02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	60	627.323.482	12	850.00										
							Luasan Bangunan yang di rehab					2.242									
		2	10	09	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>			1.561.835.607	12	1,850.00										
		2	10	09	01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	1.561.835.607	12	1,600.00										
							Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah					12									
							Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman					12									
		2	10	09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	14 orang	216.350.000	20	250.00										
							Jumlah Pakaian Dinas	121 stel				121									
						<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah</b>	80			80	300.00									





					pembangunan daerah	Informasi Pembangunan Daerah Melalui RRI, TVRI, Radio Swasta dan TV Swasta, Lokal dan Nasional serta melalui media cetak untuk penerbitan buletin advertorial													
					Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK	Jumlah Kab/Kota dalam pemerinkatan E-Government	10 kab/kota	210.100.000	10	250.00									
		2	10	13	<b>Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika</b>	<b>Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>84</b>		<b>84</b>	<b>820.00</b>									
					Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baliho dll	Jumlah poster, leaflet, buletin, baliho yang menginformasikan kebijakan pemerintah daerah serta pembangunan dan perawatan baliho	50 kegiatan	175.000.000	1	200.00									
					Komunikasi publik melalui dialog interaktif radio dan televisi	Jumlah dialog interkatif di radio dan televisi	96 dialog	30.000.000	96	55.00									
					Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM			2	200.00									
					Dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program/kegiatan perangkat daerah	1 dokumen	127.000.000	1	165.00									
		2	10	13	05	Partisipasi pada pameran/expo/pekan kebudayaan daerah	Jumlah event keikutsertaan pada pameran /	3 pameran	130.000.000	4	200.00								







					Website) Perangkat Daerah di Prov. Kaltim	Daerah yang dikelola														
					Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Program/kegiatan dari hasil rekomendasi penelitian TIK yang dilaksanakan	100%		1	150.00										
					Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen RIPTIK Rencana Induk Pengembangan TIK) yang dihasilkan	1 dokumen	212.000.000	1	150.00										
					Program penguatan dan evaluasi data dan statistik	jumlah Kajian yang diselesaikan			1	500.00										
					Pengumpulan data statistik daerah	Tersedianya data pembangunan daerah dan data pertumbuhan ekonomi yang akurat dan kredibel			1	500.00										

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah penanggung jawab	Lokasi		
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Tahun - 1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun - 5 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA Perangkat Daerah	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		(1)					(2)	(4)	(5)								(6)						













		2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah dokumen arsitektur aplikasi perangkat daerah										226.100.000	1	Dokumen	199.999.800	1	Dokumen						Kabupaten/Kota
	Terselenggaranya sistem penghubung layanan pemerintah daerah provinsi	2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan administrasi publik perangkat daerah yang terintegrasi											310.000.000,00	22	Perangkat Daerah	128.753.750	22	Perangkat Daerah					Kabupaten/Kota
		2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas												305.494.000										
		2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah															425.000.000							Kabupaten/Kota
		2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																						
		2	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																						
		2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																						
		2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>												953.673.080							748.590.130			
	Terselenggaranya penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terintegrasi	2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Elemen Data Statistik Sektoral Di Lingkup Ekonomi, Sosial, SDA dan Infrastruktur											953.673.080										
	Terselenggaranya penyelenggaraan Statistik	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Jumlah Persentase												953.673.080									

















## **BAB.V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja PD) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembanguna Daerah dan berpedoman pada Renstra PD. Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan yang nantinya akan di usulkan ke BAPPEDA Provinsi Kaltim.

Dipandang dari sisi anggaran sampai dengan tahun 2021 jumlah anggaran Diskominfo relatif terbatas, apalagi bila dibandingkan dengan target untuk mengejar berbagai ketertinggalan terutama untuk mengimbangi percepatan perubahan dan perkembangan di bidang teknologi informasi yang meliputi perangkat hardware, software dan jaringan infrastruktur, peningkatan SDM TIK. Disamping itu kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait seperti TVRI, RRI, dan Komisi Informasi Provinsi anggarannya masih melekat di Diskominfo Prov. Kaltim sehingga Diskominfo membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dengan peningkatan anggaran dari tahun 2020 ke tahun 2021 diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat mewujudkan Provinsi Kalimantan Timur berbasis Teknologi Informasi dan meningkatkan percepatan stabilitas dalam bidang komunikasi di daerah-daerah yang masih minim serta banyak



# LAMPIRAN



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*Berani Untuk Kaltim Berdaulat*

Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117

Website: <http://diskominfo.kaltimprov.go.id> e-Mail: [diskominfo@kaltimprov.go.id](mailto:diskominfo@kaltimprov.go.id)

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 060/084 /Diskominfo

### TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, maka Perangkat Daerah menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan jangka panjang daerah, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 060/084 /Diskominfo TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONIL PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Wakil Ketua : Sekretaris Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Program Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Anggota :

1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Seksi Media Publik dan Pameran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Seksi Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
10. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
11. Kepala Seksi Pengelolaan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
12. Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepala Seksi Pengembangan SDM Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
14. Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
15. Kepala Seksi Wasdal Informatika dan Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
16. Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian KPU/USO Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
17. Kepala Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
18. Kepala Sub. Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur
19. Riko Aji Prabowo, S.SN (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
20. Fery, S.Kom (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
21. Untung Maryono, ST (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
22. Irwansyah, ST (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)





23. Neneng Risnayani, SE (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
24. Rudi Syavitri, SE (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
25. Adi Setiawan, S.Kom (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
26. Sukmawaty, ST (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
27. M. Navita Sandi Al Gamar (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
28. Didit Widiawati (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)
29. Yana Nasdiah (Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur)

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 8 Maret 2021



KEPALA,  
MUHAMMAD FAISAL, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199402 1 001